



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHFUDZ
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 137635

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.537.825.000

1. Tanah Seluas 3.057 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 687.825.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/140 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.350.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR MATIC Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000
2. MOTOR, HONDA CB150R SEPEDA MOTOR KOPLING Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V MOBIL MATIC Tahun 2014, LAINNYA Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.442.692

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.994.617.692

III. HUTANG Rp. 92.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.902.617.692

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.